

Strategi Manajemen Pendidikan Keberlanjutan Pada Pendidikan Vokasional

Suriagiri, Moh. Iqbal Assyauqi
 UIN Antasari Banjarmasin
suriagiri@uin-antasari.ac.id, iqbalassyauqi@gmail.com

Abstract

Vocational education produces work-ready graduates who have skills according to the needs of the world of work. In the era of the Industrial Revolution 4.0, there were massive changes in various industries and the needs and abilities of workers. The Religious Education course is one of the Personality Development Courses (MPK). Based on the 2006 Director General of Higher Education Decree, every university can develop MPK signs according to their respective characteristics. The method used in this research is a literature study. The vocational curriculum needs to apply blended learning, which integrates face-to-face and online learning, to build graduates' abilities and skills more effectively. The curriculum must also include mastery of 4.0 competencies such as data, technological, and human literacy. For the vocational education curriculum to have a broad impact, the government, educational institutions, and industry must work together to revitalize the approach and content of the vocational education curriculum. Teachers must also be able to organize good learning to produce optimal graduate performance

Keyword: Curriculum; Islamic education; Vocational

Abstrak

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang menghasilkan lulusan siap kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Memasuki era revolusi industri 4.0 terjadi perubahan yang masif pada perbagai industri dan kebutuhan kemampuan pekerja. Mata kuliah Pendidikan Agama merupakan salah satu Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) dan Berdasarkan SK Dirjen Dikti tahun 2006 bahwa setiap Perguruan Tinggi memiliki hak mengembangkan rambu-rambu MPK sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka. Kurikulum vokasi perlu menerapkan pembelajaran blended learning, yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dan online, supaya lebih efektif membangun kemampuan dan ketrampilan lulusan. Kurikulum juga perlu memuat penguasaan kompetensi 4.0 seperti literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia. Agar kurikulum pendidikan vokasi menghasilkan dampak yang luas, pemerintah, lembaga pendidikan, industri harus bersinergi untuk merevitalisasi pendekatan dan isi kurikulum pendidikan vokasi. Pengajar juga harus dapat menyelenggarakan pembelajaran yang baik untuk menghasilkan kinerja optimal lulusan

Kata Kunci: Kurikulum; Pendidikan Agama Islam; Vokasi

Pendahuluan

Pendidikan memegang peranan adalah salah satu faktor untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk mengatasi perubahan sosial yang cepat, khususnya sebagai peranan pendidikan globalisasi dalam memperkuat karakter dalam menghadapi kompetisi global, pemikiran kritis diperlukan untuk menghasilkan hipotesis. Pendidikan abad milenium adalah pengalaman belajar dan pendewasaan diri untuk menghadapi perubahan sosial dan adaptasi dalam tingkat kehidupan sosial yang terus berlanjut pada masyarakat dunia/global. Revolusi Industri Keempat adalah sebuah kondisi pada abad ke-21 ketika besar-besaran perubahan di berbagai bidang berdasarkan perpaduan teknologi yang mengurangi sekat-sekat antara fisik, digital, dan biologi.

Aset utama dalam proses membangun suatu bangsa adalah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan tumpuan utama peningkatan kualitas suatu bangsa. Peningkatan kualitas SDM dapat dicapai melalui proses pendidikan, dengan kata lain pendidikan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas suatu bangsa.

Perubahan sosial adalah salah satu perubahan dalam menentukan perilaku struktur yang meliputi pola-pola dan interaksi sosial yang menunjuk pada perubahan fenomena sosial di berbagai bentuk dan tingkat kehidupan sosial yang meliputi analisis tingkat kehidupan manusia dalam menghadapi perubahan yang berasal dari tindakan, interaksi, kelompok masyarakat, organisasi/pranata, komunitas, nasional, dan internasional. Bentuk interaksi sosial berdasarkan kerjasama/kooperasi, harmonisasi dan serasi, penanganan persaingan, konflik, dan penyesuaian. Aspek-aspek perubahan sosial dan perilaku tingkat kehidupan semacam ini harus mendapatkan perhatian sebagai aspek sosial kemanusiaan dalam pendidikan, terutama pendidikan vokasi. Pendidikan sosial humaniora secara singkat memerlukan pendekatan pengendalian sosial dalam menghadapi masyarakat yang berubah.

Masyarakat di abad ke-21 ini menghadapi tantangan yang kompleks dan kebutuhan individu yang semakin bertambah. Pendidikan vokasional adalah strata pendidikan yang selalu dinamis seperti perubahan kurikulum yang berdasar pada pertumbuhan pasar kerja dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Wardina et al., n.d.). Pendidikan vokasional didesain untuk mempersiapkan individu-individu untuk memperoleh pekerjaan atau pekerjaan spesifik yang secara langsung berhubungan dengan produktifitas dan persaingan suatu negara (Lettmayr & Riihimäki, 2011)

Pada tahun 2015 tercatat Indonesia memiliki 55 juta tenaga kerja terampil. Berdasarkan perkiraan pada *Masterplan* Percepatan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (MP3EI), dari jumlah tersebut masih akan dibutuhkan 113 juta tenaga kerja terampil hingga tahun 2030 dengan penambahan rata-rata 3,2 juta per tahunnya. Hal ini merupakan tantangan bagi sektor pendidikan dan pelatihan (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2015). Tantangan tersebut berusaha dijawab oleh sektor pendidikan dengan menghadirkan sebuah konsep pendidikan dimana unsur praktek dalam proses pembelajaran dilakukan lebih banyak dibandingkan unsur teori. Pendidikan yang lebih mengutamakan penerapan keilmuan dibanding sisi akademis inilah yang kemudian dikenal dengan istilah pendidikan vokasi.

Indonesia menempatkan pendidikan kejuruan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk menyiapkan lulusan bekerja atau melanjutkan kejenjang lebih tinggi atau bekerja mandiri berwirausaha. Sasaran dan tujuan pendidikan kejuruan di Indonesia diatur dalam PP 19 Tahun 2005 Pasal 26 ayat 3 sebagai pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan bidang kejuruannya. Tujuan ini mengandung tiga aspek pokok, yaitu dimilikinya kompetensi kerja, karakter (kepribadian dan ahklak mulia) untuk hidup mandiri (*life skills*), dan berkembangnya karir melalui pendidikan kejuruan. Pernyataan ini tegas sekali bahwa kompetensi kerja dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan tidak cukup bagi seorang pribadi pendidikan kejuruan. Kompetensi kerja harus didukung dengan karakter kejuruan yang baik berupa kepribadian kerja dan ahklak hidup seimbang harmonis antar sesama, lingkungan, dan berke-Tuhan-an. Jelas sekali PP 19 mengamatkan dilaksanakannya pendidikan karakter dalam pendidikan kejuruan.

Sementara itu pada sisi lain, industri bergerak terus dengan sangat cepat. Belakangan ini muncul tren di kalangan kita bahwa revolusi industri telah mencapai suatu babak baru yang dikenal dengan era 4.0. Revolusi industri 1.0 dicirikan dengan adanya mekanisasi produksi, 2.0 ditandai dengan standarisasi mutu yang menyertai produksi massal, dan 3.0 sudah mulai melibatkan otomasi dan robot (Muhammad, 2018). Sedangkan era 4.0 ditandai dengan digitalisasi pada berbagai bidang sehingga yang pada awalnya manusia sebagai pusat perekonomian, kini telah mulai banyak digantikan oleh teknologi digital (Suwardana, 2018). Kita dapat melihat sekarang ini banyak hal yang dahulu dikerjakan oleh manusia, sekarang telah dikerjakan oleh komputer super yang memiliki

kecerdasan buatan. Sebutlah pintu gerbang tol otomatis, mesin-mesin produksi di pabrik, hingga munculnya fenomena ojek *online* dengan berbagai varian turunannya. Hal tersebut perlu dicermati karena di satu sisi mengurangi interaksi antar manusia yang pada hakekatnya adalah makhluk sosial. Namun, di sisi lain dianggap memiliki efektifitas dan efisiensi yang cukup tinggi sehingga kemudian dunia usaha dan industri berlomba-lomba menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan ini dengan tujuan agar tidak tertinggal dan tergerus roda jaman yang terus berputar. Inilah yang harus menjadi perhatian dari sektor pendidikan khususnya pendidikan vokasi yang diunggulkan dapat menjawab tantangan tersebut.

Pendidikan vokasi memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia seutuhnya dan dapat menjadi investasi untuk pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, terutama di Indonesia (Grasso et al., 1979). Pendidikan vokasi harus menghasilkan keterampilan dan pengadaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia industri atau dunia kerja. Pembekalan pendidikan yang baik dan mengacu pada kebutuhan kerja di dunia luar menjadi untuk semua generasi muda yang akan menjalankan pekerjaan. Jika pendidikan formal maupun informal yang diberikan tidak memenuhi kebutuhan ekonomi yang lebih luas, hampir pasti akan menambah jumlah pengangguran yang ada ("Education and Job Match," 2007).

Sejak diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, secara hukum pendidikan kejuruan di Indonesia diselenggarakan secara desentralistik. Menurut Slamet PH Implikasi mendasar dari desentralisasi pendidikan dalam konteks perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan kejuruan adalah sebagai sarana untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan keberhasilan pendidikan kejuruan. Kemandirian mengembangkan budaya lokal yang berdampak global. Desentralisasi berarti pemerintah daerah memiliki tugas dan fungsi, tanggung jawab dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pendidikan penyelenggaraan (Setiawati & Sudira, 2015). Pemerintah daerah diharapkan lebih peduli, mandiri dalam mengatur dan mengurus pembenahan mutu pendidikan kejuruan.

Paradigma baru pendidikan vokasi dalam bidang sosiologi adalah paradigma fungsional. Suatu sistem sosial dapat berfungsi jika memenuhi empat persyaratan fungsional: (a) adaptasi yang didasarkan pada kebutuhan sistem sosial untuk mengatasi lingkungannya, (b) pencapaian suatu tujuan yang didasarkan pada pencapaian suatu tujuan, (c) integrasi yang didasarkan pada pencapaian suatu tujuan. Secara sosio-budaya, hubungan antara sistem sosial dan sistem religi sangat kuat. Fungsi sistem sosial budaya adalah mengatur dan mengendalikan tindakan dan perilaku untuk mencapai sebuah solusi dan penyesuaian dalam berbagai perubahan. Dengan pemikiran ini, vokasi pendidikan menghadapi revolusi industri. 4.0 adaptasi-adaptasi adalah bagian dari pembelajaran dalam pendidikan vokasi serta upaya-upaya dedaktif/metodik. Pendidikan vokasi adalah proses pendewasaan individu melalui peningkatan keterampilan dan siap berjaya. Untuk menyikapi perubahan sosial, pendidikan vokasi sosio-humaniora sebagai respon baru terhadap globalisasi membutuhkan intervensi untuk mengkonsolidasikan perubahan sosial, perubahan organisasi, dan perubahan organisasi dalam konteks masyarakat. Perlu untuk bersiap, mengubah pendidikan visi menjadi orang pintar, bersiap untuk mencapai keunggulan, dan pemberdayaannya. Aspek sosio-humaniora terdiri dari memahami budaya dalam konteks perubahan, budaya organisasi, prestasi, menciptakan perubahan budaya, mengubah pola pikir, dan pola kepercayaan.

Akademi adalah pendidikan yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 4, pendidikan tinggi berfungsi (1) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) mengembangkan sivitas akademika yang inovatif. Dalam pendidikan vokasi, proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar disiapkan untuk pekerjaan dan keahlian terapan tertentu. Oleh karena itu, pembelajaran mengarah pada pendidikan terapan yang mendukung kompetensi lulusan sehingga setiap pembelajaran lebih bersifat

pembimbingan, tidak terkecuali Pendidikan Agama Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 disebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah (1) agama, (2) Pancasila; (3) kewarganegaraan; dan (4) bahasa Indonesia. Dengan demikian, mata kuliah tersebut wajib diberikan kepada mahasiswa perguruan tinggi sesuai dengan jenjang pendidikan.

Pendidikan Agama ditempatkan ke kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut (MPK). Dengan demikian, jelas betapa pentingnya Pendidikan Agama sebagai wahana pengembangan kepribadian mahasiswa selama proses pendidikannya di Perguruan Tinggi. Sebagai hasil dari pertimbangan tersebut, Pendidikan Agama (dalam hal ini, Pendidikan Agama Islam) berkembang menjadi sorotan yang berfokus pada bagaimana mengembangkan mata kuliah tersebut sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian mahasiswa dan tidak hanya sebagai pelengkap matakuliah.

Pendidikan Agama Islam berorientasi pada pembentukan pribadi yang berakhlak mulia, tidak hanya memberikan pengetahuan semata, namun juga merealisasikan dalam bentuk kegiatan keagamaan. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah peserta didik mengamalkan nilai-nilai yang Islami dalam kesehariannya ataukah tidak, setelah memperoleh pengetahuan agama dan mengikuti kegiatan keagamaan di Perguruan Tinggi. Apabila melihat beberapa pendapat di atas mengenai pengembangan PAI, betapa pentingnya adanya pengembangan PAI yang tidak hanya dilakukan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah saja, melainkan pada tingkat pendidikan tinggi-pun semestinya dilakukan pengembangan-pengembangan yang megacu pada pola perubahan masyarakat dan kebutuhan peserta didik atau mahasiswa. Sehingga diharapkan Pendidikan Agama Islam dapat menjadi dasar atau pijakan dalam kehidupan mahasiswa baik selama proses pendidikannya dan terlebih dalam kehidupan setelah masa pendidikannya selesai.

Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini, penulis menerapkan metode studi kepustakaan (Library Research) sebagai pendekatan utama. Metode studi kepustakaan merupakan pendekatan yang melibatkan pengumpulan data melalui bahan bacaan seperti buku, artikel, dan jurnal yang dapat diakses melalui internet, serta memanfaatkan hasil penelitian terdahulu sebagai sumber atau rujukan. Proses pencarian dan pengumpulan sumber dilaksanakan secara sistematis dengan mengikuti langkah-langkah pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data pustaka. Dengan demikian, penulis berhasil mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi dalam proses penulisan artikel ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Modal utama dalam proses membangun suatu bangsa adalah berkualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan kualitas SDM adalah tumpuan utama peningkatan kualitas suatu bangsa. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan oleh proses pendidikan, jika pendidikan memiliki signifikan kontribusi dalam peningkatan kualitas suatu bangsa.

Potensi tersebut akan menjadi modal utama pembangunan jika Pemerintah berhasil mentransformasikan sumber daya manusia dimaksud untuk mencapai kompetensi tingkat tinggi melalui transformasi pendidikan. Kompetensi yang dibutuhkan harus dikembangkan melalui penggunaan kurikulum, sarana dan prasarana, serta melalui penggunaan kegiatan dan prosedur yang dapat disesuaikan. Bekal yang harus disiapkan untuk sumberdaya produktif tidak hanya keterampilan fundamental, namun harus memiliki keterampilan komunikasi, kritis dan kreatif, literasi digital, keterampilan berpikir, tingkat keingintahuan yang tinggi.

Di Indonesia, ada beberapa bentuk pendidikan lagi yang hampir identik dengan pendidikan kejuruan: pendidikan dan latihan (diklat), pendidikan kejuruan, dan pendidikan profesi. Istilah-istilah ini membuat masyarakat awam, dan masyarakat pendidikan menjadi bingung, sehingga sering kali ada kerancuan dalam penggunaan istilah-istilah tersebut. sebagian besar masyarakat masih berpendidikan kejuruan dengan pendidikan vokasional. Pendidikan kejuruan diharapkan dapat membantu siswa dalam mengidentifikasi, mengeksplorasi, mempersiapkan, dan bertransisi ke dunia

kerja atau industri. Harapan pada kejuruan dan kejuruan pendidikan untuk membantu peserta didik mengenali dirinya sesuai tahapan yang diharapkan sangat besar. Dengan demikian, dalam kejuruan pendidikan, proses latihan yang diarahkan untuk menumbuhkan pengalaman, ransangan visual, afektif kesadaran, mencari informasi kognitif, dan pengembangan keterampilan psikomotorik adalah suatu keharusan dan hal yang pasti. Proses latihan adalah mendukung pengembangan vokasional berupa penajakan, pemantapan, dan bakat pelestarian seorang peserta didik dalam meniti karir di dunia kerja.

1. Pendidikan Vokasional

Pengembangan keterampilan adalah salah satu faktor utama untuk meningkatkan produktivitas dan usaha di era tersebut. Industri 4.0 dikenal sebagai tahapan perkembangan sistem dan teknologi yang mengintegrasikan informasi teknologi dalam proses bisnis industri. World Economic Forum (2016) mengidentifikasi karakteristik revolusi Industri 4.0 sebagai berikut: digitalisasi, optimalisasi dan kustomisasi proses manufaktur, otomatisasi dan adaptasi, interaksi manusia-mesin, layanan dan bisnis bernilai tambah, pertukaran dan komunikasi data otomatis, dan penggunaan internet. Manfaat integrasi ini adalah meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memodifikasi karakter dan komposisi area kerja (Samans, R. & Davis, N, 2017). Pendidikan tertinggi di Indonesia harus mengantisipasi perkembangan teknologi dan proses bisnis, terutama dalam mempersiapkan lulusan untuk menentukan kebutuhan dunia kerja era revolusi industri 4.0.

Kata vokasi berasal dari bahasa latin "*Vocare*" yang artinya dipanggil, surat panggilan, perintah (*summon*) atau undangan. Menurut Billet "*vocations are product of individuals experiences and interest, that are, in some ways, person dependent.constrain the human capacities required to undertake those activities*" (Köpsén, 2014). Vokasi merupakan produk atau jasa yang menarik dan merupakan pengalaman diri seseorang yang menyebabkan orang lain bergantung atau membutuhkannya sehingga dipanggil atau diundang untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan/*job*. Vokasi berhubungan dengan kapasitas yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu aktivitas pekerjaan. Proses pengembangan ke-vokasi-an seseorang membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang disebut dengan pendidikan vokasional (Setiawati & Sudira, 2015).

Pendidikan vokasi merupakan model pendidikan yang mengutamakan keunggulan berupa 70% praktek dan 30% teori dengan harapan dapat menjadi salah satu jawaban dalam permasalahan penyiapan lulusan perguruan tinggi dengan keahlian terapan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Pendidikan vokasional adalah pendidikan yang menyiapkan peserta didiknya untuk dapat memahami teori dan mempraktikkan teori tersebut. The Edge Foundation (sebuah badan amal pendidikan independen di Inggris) menjelaskan bahwa pendidikan vokasional adalah pendidikan yang pembelajarannya didemonstrasikan melalui penerapan pengetahuan dalam konteks praktis.

Pendidikan vokasional merupakan tambahan untuk pendidikan umum, proses pembelajaran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperoleh keterampilan praktis, sikap kerja yang baik, pemahaman serta pengetahuan terkait pekerjaan.¹ Menurut Kotsikis definisi pendidikan vokasional bersifat umum dan termasuk di dalamnya setiap bentuk edukasi yang bertujuan untuk memperoleh kualifikasi-kualifikasi yang terkait dengan profesi tertentu, seni, pekerjaan atau yang menyediakan pelatihan serta keahlian yang diperlukan selain pengetahuan teknis agar nantinya peserta didik mampu menjalankan profesi, seni atau aktifitas, terlepas dari usia dan tingkat pelatihan. Edukasi ini juga mengandung unsure pendidikan umum (George K. Zarifis, n.d.).

Ada 5 tipe pendidikan vokasi di Indonesia, yaitu : (1) Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan, (2) Akademi Komunitas; (3) Politeknik, (4) Universitas, dan (5) Balai Latihan Kerja (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2015). Pendidikan vokasional di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Menurut

¹ (Hollander & Mar, 2009)

undang-undang tersebut pendidikan vokasi adalah pendidikan yang menyiapkan Mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan atau kemampuan kerja tinggi. Pendidikan vokasi terdiri dari pendidikan diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4 yang setara strata 1 atau disebut dengan sarjana terapan. Pendidikan Vokasional di Indonesia diselenggarakan oleh pendidikan tinggi vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang memberikan bekal pengetahuan pemahaman, dan keterampilan khusus bagi peserta didik untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut.

Pendidikan vokasi termasuk semua bentuk pendidikan yang bersifat keteknikan dan vokasional dan diselenggarakan oleh berbagai bentuk institusi pendidikan, baik pemerintah atau masyarakat, berbentuk formal atau nonformal, dengan tujuan untuk membantu masyarakat memperoleh pendidikan dan pelatihan berdasarkan prinsip pembelajaran sepanjang hayat (*Pendidikan Teknik Dan Vokasional: Menggali Pengalaman Sukses Institusi Bi ... - Ivan Hanafi - Google Buku*, n.d.). Kurikulum pendidikan vokasi dikembangkan bersama oleh pendidikan tinggi dengan masyarakat profesi dan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi yang dikembangkan agar lulusan program vokasi dapat memenuhi syarat kompetensi profesi yang ditetapkan.

Pendidikan vokasi (program diploma) bertujuan menyiapkan peserta didik kemampuan tenaga ahli dibidangnya dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan/atau kesenian. Bahan pengajaran di program pendidikan vokasi mata kuliah keterampilan dan keahlian dibanding dengan beban mata kuliah teori. Pembelajaran kejuruan tidak dapat berdasarkan pendekatan akademik, karena pendidikan kejuruan memiliki tujuan yang berbeda dengan pendidikan akademik. Pendidikan vokasi menitikberatkan pada dunia kerja yang nyata dan kompetensi terkait keterampilan praktis yang dikembangkan melalui pengetahuan dan pemahaman. Lucas, Spencer, dan Claxton mengatakan bahwa tujuan utama pendidikan kejuruan adalah mengembangkan kompetensi bekerja, kemampuan, dan keterampilan untuk melakukan hal-hal yang terampil dengan standar yang ditetapkan di bidang kejuruan tersebut (Lucas et al., 2013). Pembelajaran vokasional adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar pendidikan tinggi yang mendukung pada penguasaan keahlian terapan tersebut, yaitu program pendidikan diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4, yang Akibatnya, pendidikan kejuruan memerlukan penggunaan terminologi khusus.

Pendidikan vokasional mempunyai dua misi: *pertama* mendorong peserta didik lebih berdaya saing dalam bidang pekerjaan, sehingga seseorang dapat mencapai tujuan karir untuk kelayakan hidup. *Kedua* adalah menjadikan pertumbuhan ekonomi negara lebih kuat dalam persaingan internasional melalui peningkatan keterampilan pekerja dan produktivitasnya. Dengan demikian, pendidikan tenaga kerja bertujuan menghasilkan pekerja terampil untuk jenjang pasca pendidikan sekolah menengah dan sebagai wahana mengembangkan sumber daya manusia untuk menjadi seorang yang profesional. (*Pendidikan Teknik Dan Vokasional: Menggali Pengalaman Sukses Institusi Bi ... - Ivan Hanafi - Google Buku*, n.d.)

Di Indonesia, tujuan pendidikan teknologi kejuruan dan vokasi masih terkesan dualistik, yaitu *pertama*, menyiapkan peserta didik memasuki dunia kerja, dan *kedua*, melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi. Peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1990 merumuskan bahwa Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja, serta mengembangkan sikap profesional (Kholis et al., 2019).

2. Kurikulum dan Bidang-bidang Pendidikan vokasional

Kurikulum yang disusun berkaitan dengan hasil capaian kompetensi lulusan, berhubungan juga dengan *learning outcome* yang dihasilkan dari suatu pendidikan vokasi, sehingga perlu di kaji betul kurikulum yang sesuai di pendidikan vokasi agar lulusan yang dihasilkan nantinya mampu bersaing di dunia kerja, terserap di dunia kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan kurikulum saat ini telah mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) atau standar internasional. Salah satu *roadmap* kebijakan pengembangan vokasi Indonesia 2017-2025, yakni dimana kurikulum yang terlalu *general* di sekolah vokasi (Djamhari et al., 2018). Berdasarkan kebijakan tersebut terlihat salah satunya mengenai kurikulum yang terlalu general di sekolah vokasi, hal ini membuktikan masih adanya permasalahan yang

terjadi dari kurikulum untuk vokasi saat ini, sehingga perlu dilakukannya perbaikan-perbaikan secara cermat dalam menata kurikulum yang selaras.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 disebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah (1) agama, (2) Pancasila; (3) kewarganegaraan; dan (4) bahasa Indonesia. Dengan demikian, mata kuliah tersebut wajib diberikan kepada mahasiswa perguruan tinggi sesuai dengan jenjang pendidikan. Terkait dengan Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai mata kuliah pada jenjang Pendidikan Tinggi, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa serta Nomor 045/U/2002 tentang, Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa pada seluruh jurusan (Kemdiknas, 2000).

Pendidikan Agama dalam lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut ditempatkan ke dalam kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Sehingga terlihat jelas bagaimana pentingnya peranan Pendidikan Agama sebagai sarana pengembangan kepribadian mahasiswa dalam proses pendidikannya di Perguruan Tinggi. Melihat dari kepentingan tersebut maka sudah semestinya Pendidikan Agama (dalam hal ini Pendidikan Agama Islam) menjadi sorotan bersama bagaimana mengembangkan mata kuliah tersebut sehingga benar-benar dapat berfungsi sebagai matakuliah pengembangan kepribadian mahasiswa dan tidak hanya sebagai matakuliah pelengkap saja.

Kurikulum harus berkaitan dengan beberapa bagian yaitu: 1) Kurikulum harus berkaitan dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. 2) Korespondensi antar komponen-komponen kurikulum adalah sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan, dan evaluasi sesuai dengan proses, isi dan tujuan kurikulum (*Pengembangan kurikulum*, 2005). Menurut Sudira, kurikulum pendidikan vokasi TVET (Technical and Vocational Education Training) memuat panduan program pengembangan kompetensi lulusan terhadap dunia kerja. Kurikulum TVET sebagai program pembelajaran yang utuh dan lengkap memuat landasan filosofi program teoritis, profil kompetensi lulusan, standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran, struktur mata pelajaran dan deskripsi silabus (Sudira, 2018).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penugasan keahlian terapan tertentu pendidikan vokasi kebutuhan sumber daya manusia dalam industri terapan akan terpenuhi. "Pendidikan vokasi bisa dijadikan opsi untuk meluaskan jangkauan keilmuan. Di samping itu, ada baiknya untuk tidak melupakan pondasi akar keilmuan dan hakikat kehadiran PTKI yaitu untuk menghadirkan pendidikan agama, ada empat disiplin keilmuan yang akan menjadi fokus politeknik pada PTKI yaitu, Food (Makanan), Fashion (Tata Busana), Art (Seni), dan Tourism (Pariwisata). Menurutnya, keempat disiplin tersebut sangat penting, mengingat perkembangan dan minat pasar begitu besar.

Dalam kurikulum Pendidikan Agama di PTU dan UUSPN No. 2/1989 pasal 39 ayat2, pendidikan agama merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau pelatihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Lebih jauh Pendidikan Agama diharapkan agar dapat membentuk kesalehan peserta didik baik kesalehan pribadi maupun kesalehan sosial, sehingga pendidikan tidak menumbuhkan semangat fanatisme, menumbuhkan sikap intoleran di kalangan mahasiswa dan masyarakat Indonesia dan memperlemah kerukunan hidup beragama serta kesatuan nasional. Dalam konteks ini, Pendidikan Agama ingin membentuk mahasiswa agar menciptakan kebaikan baik untuk dirinya maupun untuk masyarakatnya, baik berkaitan dengan aspek ibadah maupun mu'amalah, baik urusan pribadi maupun urusan publik. Selain itu pendidikan agama juga diharapkan dapat menciptakan pribadi yang saleh, membentuk calon anggota masyarakat yang berbudi luhur, dan mencetak calon-calon pemimpin yang memiliki kepribadian yang penuh tauladan. Pelaksanaan pembelajaran PAI di perguruan tinggi telah diwajibkan sejak tahun 1966 (Arifin, 2014). Dalam kurikulum

nasional pendidikan tinggi, pendidikan agama merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa yang beragama Islam di seluruh perguruan tinggi umum, di setiap jurusan, program dan jenjang pendidikan, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Menurut SK Dirjen Dikti No. 38/2002, tujuan umum pendidikan agama Islam di perguruan tinggi adalah memberikan landasan pengembangan kepribadian kepadamahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berfikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional.

3. Isu-isu Pendidikan Vokasi

Secara umum pendidikan vokasi (program diploma) bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tenaga ahli profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Masalah-masalah pendidikan vokasi dan kejuruan umumnya terletak pada peningkatan kualitas akses dan peningkatan kualitas mutu. Secara umum pendidikan vokasi dan kejuruan harus membangun regulasi kerangka kerja yang dapat mendorong investasi fisik, fiskal, dan modal manusia serta institusi makro ekonomi dalam mengambil kebijakan keberlangsungan output dan pertumbuhan lapangan kerja. Reformasi kebijakan pendidikan vokasi dan kejuruan dilakukan dengan mengevaluasi persediaan program-program pendidikan vokasi dan kejuruan dengan perubahan permintaan pasar kerja, membangun komitmen kerjasama, dan melakukan perbaikan dukungan implementasi.

Dari sisi jumlah SDM, Indonesia memiliki kelebihan diantara negaranegara anggota G-20 yaitu Bonus Demografi yang dialami pada tahun 2020- 2030. Saat ini Indonesia memiliki 68,6% atau sekitar 181,3 juta orang berada pada usia produktif. Boleh dikatakan, sumber daya manusia melimpah inilah yang saat ini paling diandalkan untuk memajukan Indonesia dalam "bersaing" dengan sesama negara anggota G20. Oleh karena itu, di tengah pertumbuhan ekonomi dan PDB yang stagnan, Indonesia wajib mengembangkan sumberdaya manusianya agar dapat terus eksis bersama negara-negara anggota G20 lainnya. Potensi ini akan menjadi modal besar pembangunan jika Pemerintah mengelola sumber daya manusia tersebut agar memiliki kompetensi yang tinggi melalui transformasi pendidikan. Kompetensi yang diperlukan harus disiapkan dengan didukung oleh kurikulum, sarana dan prasarana, pendanaan serta pengelolaan yang adaptif. Bekal yang harus disiapkan bagi sumberdaya produktif, tidak cukup hanya keterampilan basis, namun harus memiliki ketrampilan komunikasi, kritis dan kreatif, digital literasi, ketrampilan berpikir, tingkat keingintahuan yang tinggi, ketrampilan interpersonal, multi kultural, multi bahasa, dan terampil menyelesaikan masalah.

Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui revitalisasi SMK. Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Inpres ditujukan kepada beberapa Menteri, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Para Gubernur. Inti dari Inpres ini adalah dalam rangka penguatan sinergi antar pemangku kepentingan untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Hambatan besar yang dihadapi oleh lembaga pendidikan kejuruan dan vokasi adalah ketidakcukupan anggaran biaya untuk pengembangan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan vokasi dan kejuruan. Disamping itu ketidak lengkapan informasi ketersediaan training dan pragmentasi pelaksanaan kompetensi keahlian, lemahnya jaringan informasi diantara penyedia training dengan para pengguna, dan lemahnya kapasitas kemampuan lembaga pendidikan vokasi dan kejuruan merupakan masalah-masalah utama pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi. Masalah-masalah yang mungkin terjadi diantara pengembang pendidikan kejuruan dan vokasi antara lain: (1) pertumbuhan tenaga kerja tinggi sedangkan pertumbuhan lapangan kerja rendah sehingga laju pengangguran meningkat; (2) pertumbuhan tenaga kerja tinggi dan pertumbuhan lapangan kerja tinggi sehingga laju pengangguran menjadi rendah; (3) pertumbuhan tenaga kerja rendah dan pertumbuhan lapangan kerja

rendah sehingga laju pengangguran sedang. Tekanan akibat pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi menyebabkan masalah-masalah kebijakan pada saat pertumbuhan lapangan kerja yang tidak memenuhi.

Pendidikan kejuruan dan vokasi digerakkan oleh kebutuhan pasar kerja dan berkontribusi pada penguatan ekonomi nasional. Keberadaan pendidikan vokasi dan kejuruan sedari awal memang dikembangkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pasar kerja suatu daerah kabupaten, negara, bahkan pasar kerja luar negeri. Pasar kerja atau lapangan pekerjaan yang ada dan berkembang dan dibutuhkan oleh masyarakat suatu negara dalam proses pembangunan bangsanya harus dijadikan sebagai basis pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi. Bahkan pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan dapat saja digunakan dan diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui program-program kewirausahaan. Pergeseran paradigma pendidikan kejuruan dan vokasi dalam rangka menuju pemenuhan pasar tenaga kerja harus berubah total dari *supply driven* ke *demand driven*. Dengan paradigma *demand driven* pendidikan kejuruan dirancang program diklatnya berdasarkan kebutuhan pasar dan lapangan kerja.

Pendidikan kejuruan dan vokasi diselenggarakan untuk mempersiapkan tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah modal pembangunan ekonomi bangsa. Dengan demikian, pendidikan kejuruan dan vokasi yang menghasilkan tenaga kerja terlatih akan memberi kontribusi besar pada penguatan ekonomi, pembangunan ekonomi, dan kekuatan ekonomi nasional bangsa. Pendidikan kejuruan dan vokasi dapat membantu pengentasan pengangguran melalui training anak-anak muda dan orang dewasa dan mentraining kembali. Untuk layanan ketrampilan dan kompetensi teknis. Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan dalam pendidikan vokasi dan kejuruan yang diperuntukkan untuk membentuk kompetensi kerja masyarakat membantu menekan pengangguran dan bahkan diharapkan bisa meniadakan atau mengentaskan pengangguran.

Simpulan

Pendidikan vokasi merupakan model pendidikan yang mengusung keunggulan berupa 70% praktek dan 30% teori dengan harapan dapat menjadi salah satu jawaban dalam permasalahan penyiapan lulusan perguruan tinggi dengan keahlian terapan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Secara umum pendidikan vokasi (program diploma) bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tenaga ahli profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penugasan keahlian terapan tertentu pendidikan vokasi kebutuhan sumber daya manusia dalam industri terapan akan terpenuhi. Masalah-masalah pendidikan vokasi dan kejuruan umumnya terletak pada peningkatan kualitas akses dan peningkatan kualitas mutu. Secara umum pendidikan vokasi dan kejuruan harus membangun regulasi kerangka kerja yang dapat mendorong investasi fisik, fiskal, dan modal manusia serta institusi makro ekonomi dalam mengambil kebijakan keberlangsungan output dan pertumbuhan lapangan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamhari, E. A., Ningrum, D. R., Harja, I. T., Thaariq, R. M., Zunivar, A. Y., Ramdlaningrum, H., & Lauranti, M. (2018). *Vokasi di Era Revolusi Industri (Kajian Ketenagakerjaan di Daerah)* [Report:Report]. Perkumpulan PRAKARSA. <https://repository.theprakarsa.org/uk/publications/328324/>
- Education and job match: The relatedness of college major and work. (2007). *Economics of Education Review*, 26(4), 397–407. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2006.08.003>
- George K. Zarifis. (n.d.). *Vocational education and training policy development for young adults in the European union: A thematic analysis of the EU trend of convergence towards integration, drawn from the brief presentation of the VET policies adopted in three member states: Research in Post-Compulsory Education: Vol 5, No 1*. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13596740000200071>. Retrieved October 23, 2021, from <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13596740000200071>
- Grasso, J. T., Shea, J. R., & Carnegie Council on Policy Studies in Higher Education. (1979). *Vocational education and training: Impact on youth : a technical report for the Carnegie Council on Policy Studies in Higher Education*. Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.
- Hollander, A., & Mar, N. Y. (2009). Towards Achieving TVET for All: The Role of the UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training. In *International Handbook of Education for the Changing World of Work* (pp. 41–57). Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5281-1_3
- Kholis, N., Wibawa, B., & Soeprijanto, S. (2019). Analisis Rantai Nilai Pendidikan Kejuruan dalam Mengembangkan Entrepreneurship: Studi Kasus pada SMK PGRI 20 Jakarta. *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(2), 124–135. <https://doi.org/10.32487/jshp.v3i2.703>
- Köpsén, S. (2014). How vocational teachers describe their vocational teacher identity. *Journal of Vocational Education & Training*, 66(2), 194–211. <https://doi.org/10.1080/13636820.2014.894554>
- Lettmayr, C. F., & Riihimäki, T. (2011). The Benefit of Vocational Education and Training. *European Centre for the Development of Vocational Training. Luxembourg: Publication Office of the European Union*.
- Lucas, B., Claxton, G., & Spencer, E. (2013). *Progression in Student Creativity in School: First Steps Towards New Forms of Formative Assessments*. <https://doi.org/10.1787/5k4dp59msdwk-en>
- Muhammad, Y. (2018, April 3). *Era Industri 4.0: Tantangan dan Peluang Perkembangan Pendidikan Kejuruan Indonesia* [Other]. <http://eprints.unm.ac.id/6456/>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2015). *Education in Indonesia rising to the challenge*. <http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=3564376>
- Pendidikan Teknik dan Vokasional: Menggali Pengalaman Sukses Institusi Bi ... - Ivan Hanafi—Google Buku*. (n.d.). Retrieved October 23, 2021, from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=8Hk6DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Ivan+Hanafi,+Pendidikan+Teknik+dan+Vokasional+\(Yogyakarta:+Deepublish,+2014\)&ots=S-lmaIe3Su&sig=TrHtx0r_u0Lgwf2_peXm90GsmoM&redir_esc=y#v=onepage&q=Ivan%20Hanafi%20Pendidikan%20Teknik%20dan%20Vokasional%20\(Yogyakarta%3A%20Deepublish%20202014\)&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=8Hk6DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Ivan+Hanafi,+Pendidikan+Teknik+dan+Vokasional+(Yogyakarta:+Deepublish,+2014)&ots=S-lmaIe3Su&sig=TrHtx0r_u0Lgwf2_peXm90GsmoM&redir_esc=y#v=onepage&q=Ivan%20Hanafi%20Pendidikan%20Teknik%20dan%20Vokasional%20(Yogyakarta%3A%20Deepublish%20202014)&f=false)
- Pengembangan kurikulum: Teori dan praktek / Nana Syaodih Sukmadinata*. (2005). Bandung : Remaja Rosda Karya.

http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=26382

- Samans, R. & Davis, N. (2017). Advancing Human-Centred Economic Progress in the Fourth Industrial Revolution: A Leadership Agenda for G20 Governments. *G20 Insights*. https://www.g20-insights.org/policy_briefs/advancing-human-centred-economic-progress-fourth-industrial-revolution-leadership-agenda-g20-governments/
- Setiawati, L., & Sudira, P. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar praktik kejuruan siswa SMK program studi keahlian teknik komputer dan informatika. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 5(3), 325–339. <https://doi.org/10.21831/jpv.v5i3.6487>
- Sudira. (2018). *Metodelogi pembelajaran vokasional abad XII* (Yogyakarta). UNY Press.
- Suwardana, H. (2018). Revolusi Industri 4. 0 Berbasis Revolusi Mental. *jatiunik JATI UNIK : Jurnal Ilmiah Teknik dan Manajemen Industri*, 1(1), 102.
- Wardina, U. V., Jalinus, N., & Asnur, L. (n.d.). *KURIKULUM PENDIDIKAN VOKASI PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0* | *Jurnal Pendidikan*. Retrieved October 21, 2021, from <http://www.jurnal.ut.ac.id/index.php/JP/article/view/240>